



Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Erni Suryani¹, Miswar^{2*}, Safuridar³

¹⁻³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra, Indonesia

Email: serni694@gmail.com¹, miswar@unsam.ac.id², safuridar@unsam.ac.id³

*Penulis Korespondensi: miswar@unsam.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the effect of goods and services expenditure and social assistance expenditure on economic growth in Aceh Province. Economic growth is an important indicator of regional development performance and can be influenced by government fiscal policies through regional expenditures. This research employed a quantitative approach using secondary time-series data for the period 2012–2024 obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Aceh Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Multiple linear regression analysis was used to examine the influence of the independent variables on economic growth. The results indicate that goods and services expenditure has a positive and significant effect on economic growth in Aceh Province. Meanwhile, social assistance expenditure has a negative and insignificant effect on economic growth. Simultaneously, both goods and services expenditure and social assistance expenditure affect economic growth. The findings suggest that goods and services expenditure is a more effective component of government spending in stimulating regional economic activities, while social assistance expenditure primarily functions as a social protection instrument. Therefore, local governments should optimize the quality of public spending to support sustainable economic growth.*

Keywords: Aceh Province; Economic Growth; Fiscal Policy; Goods Services Expenditure; Social Assistance.

Abstrak. Riset ini memiliki tujuan untuk mempelajari pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah melalui pengeluaran daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk time series periode 2012–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Sementara itu, belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa belanja barang dan jasa merupakan komponen pengeluaran pemerintah yang lebih efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, sedangkan belanja bantuan sosial lebih berperan sebagai instrumen perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kualitas belanja publik agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Bantuan Sosial; Belanja Barang Jasa; Kebijakan Fiskal; Pertumbuhan Ekonomi; Provinsi Aceh.

1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah sering kali diukur menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu parameter utamanya. Tingkat pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah, tetapi juga menunjukkan adanya ekspansi dalam kapasitas produksi barang maupun jasa (Marcal et al., 2024; Qolbi & Amri, 2023). Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi terjadi karena meningkatnya output sebagai akibat bertambahnya faktor produksi yang digunakan tanpa adanya perubahan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya

mencerminkan besarnya output yang dihasilkan, tetapi juga menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Jubir et al., 2023). Dinamika pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah turut ditentukan oleh berbagai variabel, yang salah satunya bersumber dari kebijakan fiskal berupa belanja pemerintah (Yuliyanto & Winarni, 2022).

Sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah memiliki peran strategis dalam mengendalikan dan mengarahkan aktivitas perekonomian melalui pengalokasian anggaran penerimaan dan belanja negara maupun daerah (Faoziah & Rifqi, 2025). Kebijakan fiskal tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, mendorong output perekonomian, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi (Anitasari, 2017). Di tingkat daerah, pengeluaran pemerintah direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan ke berbagai jenis belanja, termasuk belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Kedua jenis belanja tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama berpotensi memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya beli masyarakat (Pattimahu & Tangke, 2025; Arifin & Sumarmo, 2023).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren yang cenderung meningkat setelah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami penurunan sehingga PDRB hanya mencapai Rp131.580,97 miliar. Namun, kondisi tersebut berangsur membaik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai pertumbuhan sebesar 4,66% pada tahun 2024 dengan nilai PDRB sebesar Rp153.780,44 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh berhasil memasuki fase pemulihan yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk melalui pengeluaran pemerintah sebagai instrumen fiskal daerah.

Tabel 1. Data Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2020–2024.

Tahun	Bantuan Sosial	Perkembangan (%)
2020	695,81	-
2021	520,24	-25,23
2022	534,02	2,65
2023	524,22	-1,835
2024	332,05	-36,65

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu 2025

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat, perkembangan belanja barang dan jasa pemerintah justru memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam. Setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, realisasi belanja barang dan jasa

mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga 2024. Padahal secara teoritis, peningkatan belanja barang dan jasa seharusnya mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Gosal et al., 2022). Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tren pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan salah satu komponen pengeluaran pemerintah sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Tabel 2. Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Provinsi Aceh Tahun 2020–2024.

Tahun	Barang dan Jasa (dalam Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)
2020	9.365,57	-
2021	11.433,02	22,08
2022	12.637,84	10,54
2023	10.261,87	-18,80
2024	9.863,79	-3,879

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu 2025

Fenomena serupa juga terjadi pada belanja bantuan sosial. Data menunjukkan bahwa alokasi bantuan sosial di Provinsi Aceh cenderung mengalami penurunan selama periode penelitian, terutama pada tahun 2024 yang turun menjadi Rp332,05 miliar atau sebesar -36,65%. Padahal, belanja bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mampu menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sari et al., 2024). Penurunan anggaran bantuan sosial yang terjadi di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya dinamika kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya sejalan dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya (Carorin & Carorin, 2018).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Gosal et al. (2022) menemukan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap aktivitas ekonomi daerah, sedangkan penelitian Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial mampu meningkatkan konsumsi masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Anitasari (2017) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah merupakan instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Himie, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Asnawi (2022) juga menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana peningkatan belanja modal sebesar 1% mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,126%, sedangkan belanja sosial sebesar 1% dapat meningkatkan sebesar 0,089%. Sejalan dengan itu, Sumiyarti (2022)

menemukan bahwa belanja modal dan belanja bantuan sosial secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan nilai koefisien determinasi yang tinggi, yaitu 94% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, serta turut berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengaruh masing-masing jenis belanja pemerintah secara terpisah atau dilakukan pada wilayah penelitian yang berbeda. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dengan menggunakan data terbaru periode 2020–2024 yang mencerminkan kondisi pascapandemi COVID-19. Kondisi tersebut menjadi research gap sekaligus menunjukkan urgensi penelitian ini.

Berdasarkan fenomena empiris, kajian teoritis, dan research gap tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis simultan pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menggunakan data periode 2020–2024 yang merepresentasikan masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Temuan dari penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi perluasan dan pengayaan studi di bidang kebijakan fiskal daerah sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan komposisi pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari variabel belanja barang dan jasa serta bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang tercermin dari kenaikan output riil atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga mencerminkan perubahan struktur ekonomi, produktivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kapasitas jangka panjang dalam menyediakan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat yang didukung oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, dan perubahan sosial. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akumulasi modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi, sumber daya alam, serta kebijakan

pemerintah yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Awandari & Indrajaya, 2016; Hatati, 2021; Priyono & Ismail, 2003).

Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori pertumbuhan Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Dalam model ini, modal dan tenaga kerja hanya mampu meningkatkan output sampai titik tertentu karena adanya diminishing returns, sedangkan kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Solow juga menegaskan bahwa investasi diperlukan untuk menambah stok modal dan mencegah terjadinya pengenceran modal (capital dilution) akibat pertumbuhan penduduk, sehingga kebijakan yang mendorong investasi dan inovasi teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Priyono & Ismail, 2003).

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berasal dari faktor-faktor internal suatu negara, seperti investasi pada sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan (research and development), inovasi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan produktivitas. Berbeda dengan teori neoklasik yang menganggap kemajuan teknologi bersifat eksogen, teori ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dapat diciptakan melalui investasi pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inovasi yang menghasilkan efek jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kontribusi krusial pemerintah terletak pada penyediaan ruang dan kebijakan yang mampu mendorong eskalasi kapabilitas serta mutu tenaga kerjadan inovasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Priyono & Ismail, 2003).

Musgrave's Theory of Public Finance

Musgrave membagi tanggung jawab ekonomi pemerintah ke dalam tiga fungsi: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melalui fungsi alokasi, pemerintah mengintervensi keterbatasan pasar dengan menyediakan barang publik yang krusial bagi masyarakat, seperti sarana infrastruktur, pemenuhan kesehatan, serta pendidikan. Fungsi distribusi bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan melalui kebijakan fiskal, termasuk bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, fungsi stabilisasi dilakukan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dengan menjalankan ketiga fungsi tersebut secara efektif, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan

kapasitas produksi, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (Musgrave & Musgrave, 1989).

Teori Keynesian

Teori Keynesian menempatkan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Menurut Keynes, pendapatan nasional dirumuskan sebagai $Y = C + I + G + (X - M)$, di mana pengeluaran pemerintah (G) merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan output nasional. Ketika konsumsi masyarakat dan investasi swasta melemah, pemerintah dapat meningkatkan belanja barang dan jasa maupun pengeluaran sosial untuk menciptakan *multiplier effect*, yaitu peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar daripada tambahan belanja awal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya pada saat terjadi perlambatan ekonomi atau resesi (Priyono & Ismail, 2003).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi. Pengeluaran pemerintah terdiri atas belanja barang dan jasa serta transfer pemerintah, termasuk belanja bantuan sosial. Belanja barang dan jasa digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian. Sementara itu, belanja bantuan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga daya beli, dan mengurangi kesenjangan pendapatan sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan permintaan agregat (Ridwan & Nawir, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan data sekunder berbentuk time series periode 2012–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sedangkan variabel independennya meliputi belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak

EViews 11. Sebelum pengujian hipotesis, model diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model memenuhi asumsi regresi. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terletak di ujung paling barat Indonesia dan berada di bagian utara Pulau Sumatra. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder periode 2012–2024 karena wilayah ini memiliki dinamika pengelolaan keuangan daerah yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Selama periode penelitian, perkembangan perekonomian Aceh menunjukkan kondisi yang berfluktuasi, sehingga diperlukan analisis mengenai efektivitas kebijakan belanja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh periode 2012–2024. Adapun hasil estimasi regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	106964.4	20633.76	5.183949	0.0004
X1(Belanja barang dan jasa)	4.717658	1.244835	3.789785	0.0035
X2(Belanja bantuan sosial)	-0.354812	0.189385	-1.873496	0.0905
R-squared	0.771553	Mean dependent var		127067.4
Adjusted R-squared	0.725863	S.D. dependent var		14486.59
S.E. of regression	7584.900	Akaike info criterion		20.90488
Sum squared resid	5.75E+08	Schwarz criterion		21.03525
Log likelihood	-132.8817	Hannan-Quinn criter.		20.87808
F-statistic	16.88688	Durbin-Watson stat		1.724221
Prob(F-statistic)	0.000622			

Sumber: Data di olah Eviews 11 (2025)

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LOGPE} = 106964,4 + 4,717658 \text{ LOGX}_1 - 0,354812 \text{ LOGX}_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 106964,4 menunjukkan bahwa apabila Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Bantuan Sosial dianggap konstan, maka nilai Pertumbuhan Ekonomi sebesar 106964,4. Variabel Belanja Barang dan Jasa memiliki koefisien sebesar 4,717658 dengan nilai probabilitas 0,0035 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Artinya, setiap peningkatan Belanja Barang dan Jasa akan diikuti oleh peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial memiliki koefisien sebesar -0,354812 dengan nilai probabilitas 0,0905 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Dengan demikian, perubahan Belanja Bantuan Sosial belum mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi selama periode penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik.

Uji Asumsi Klasik	Indikator	Nilai Probabilitas	Keterangan
Normalitas	Jarque-Bera	0,683744	Residual berdistribusi normal
Multikolinearitas	VIF X1 = 1,346752; VIF X2 = 1,346752	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	White Test (Obs*R-Squared)	0,2084	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Autokorelasi	Breusch-Godfrey (Obs*R-Squared)	0,6884	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 11 (2025)

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh asumsi yang dipersyaratkan. Nilai probabilitas uji normalitas sebesar 0,683744 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Selanjutnya, nilai VIF masing-masing variabel independen sebesar 1,346752 mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,2084 dan uji autokorelasi sebesar 0,6884, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Belanja Barang dan Jasa memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0035 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Sementara itu, variabel Belanja Bantuan Sosial memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0905 ($> 0,05$), sehingga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-statistic sebesar 16,88688 dengan probabilitas sebesar 0,000622 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Bantuan Sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,725863 menunjukkan bahwa sebesar 72,58% variasi Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial, sedangkan sisanya sebesar 27,42% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, variabel Belanja Barang dan Jasa memiliki koefisien sebesar 4,717658 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0035 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh periode 2012–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja barang dan jasa mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Temuan tersebut sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama permintaan agregat yang dapat meningkatkan konsumsi, produksi, dan pendapatan masyarakat. Dalam konteks Aceh, belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional pemerintahan dan pelayanan publik memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik Solow-Swan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal dan peningkatan produktivitas. Belanja barang dan jasa pemerintah dapat berfungsi sebagai modal publik yang mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kapasitas produksi daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gosal et al. (2022), Mawaddah et al. (2024), Pangestu (2018), dan Rahmanda et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, variabel Belanja Bantuan Sosial memiliki koefisien sebesar -0,354812 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0905 ($> 0,05$), sehingga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh periode 2012–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja bantuan sosial belum mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perspektif teori pertumbuhan endogen, kontribusi belanja sosial terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal apabila diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja.

Selain itu, menurut teori fungsi keuangan publik Musgrave, bantuan sosial lebih berperan sebagai instrumen distribusi pendapatan dan perlindungan kelompok rentan daripada sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengaruh negatif dan tidak signifikan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial di Aceh lebih berfungsi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dibandingkan meningkatkan output ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lau et al. (2025), Natalia et al. (2019), Widodo (2020) yang menemukan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2012–2024, dapat disimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan alokasi belanja tersebut mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, belanja bantuan sosial menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa realisasi bantuan sosial belum memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan output ekonomi daerah. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan belanja barang dan jasa menjadi variabel yang lebih dominan dalam menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan belanja daerah merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Aceh disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja barang dan jasa, terutama pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan

peningkatan PDRB. Selain itu, pengelolaan belanja bantuan sosial perlu diarahkan secara lebih tepat sasaran serta diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha masyarakat agar tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas penerima manfaat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan dua variabel independen dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi, tenaga kerja, inflasi, atau belanja modal agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Anitasari, A. S. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu*.
- Asnawi. (2022). Apakah Belanja Modal Dan Belanja Sosial Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi? Bukti Data Panel Di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 104–111. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.582>
- Awandari, L. P. P., & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(1), 1435–1462.
- Faoziah, S., & Rifqi, R. (2025). The Role of Government in Indonesia's Economy: State Budget, Fiscal, and Monetary Policies. *Lentera Demokrasi*, 1(4), 167–175.
- Gosal, J. S., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). *Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2005-2021*. 22(5), 85–96.
- Hatati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>
- Jubir, J., Ikbali, M., Hamid, R. S., & Goso, G. (2023). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu*. 6(1), 71–91. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900>
- Lau, M. A., Masinambow, V. A. J., & Lopian, A. L. C. P. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah, Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Gorontalo*. 25(9), 129–142.
- Marcil, I. A. F., Oentoro, Y. P., & Yasin, M. (2024). Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan perkembangan perekonomian suatu negara. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 40–47.
- Mawaddah, N., Lubis, P. K. D., Fadly, R., Adriansyah, T., & Ramadhan, W. (2024). *Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 10(6), 598–605.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*.
- Natalia, N. D. A., Rumat, V. A., & Tolosang, K. D. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan

- Belanja Sosial Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(3), 97–106.
- Pangestu, E. C. (2018). *Belanja Dan Investasi Kalimantan Selatan*. 1(1), 33–42.
- Pattimahu, A. M., & Tangke, D. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Efisiensi dan Pertumbuhan Belanja pada Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022–2024. *Journal of Applied Accounting*, 4(2), 102–107.
- Priyono, & Ismail, Z. (2003). *Teori Ekonomi*.
- Rahmanda, R., Andini, R., Sitepu, C. R. A. B., Malau, V. M. T., & Banjarnahor, A. T. N. (2025). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2413–2423. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3586>
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*.
- Sari, Y. P., Handra, H., & Yonnedi, E. (2024). *An Analysis of the Impact of Regional Taxes, Social Assistance Expenditures, and Income Inequality on Economic Growth in Regencies/Cities in Aceh Province*. 132–143.
- Sumiyarti. (2022). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 28–43.
- Widodo, S. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, Dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i2.87>
- Carorin, C., & Carorin, C. (2018). Revitalisasi terminal di Desa Widorokandang sebagai upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Pati. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.36694/jimat.v3i1.30>
- Himie, F. (2022). Perspektif GCG atas perlindungan konsumen (Studi tentang prinsip GCG dalam forum komunikasi pelanggan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang). *Jurnal Media Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.59>
- Arifin, A., & Sumarmo, S. (2023). Reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik transportasi di daerah tertinggal. *Jurnal Media Administrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v6i1.480>
- Qolbi, H. N., & Amri, K. (2023). Efektivitas bantuan keuangan khusus pada Badan Usaha Milik Desa Bina Karya di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i2.449>
- Yuliyanto, I. M., & Winarni, A. T. (2022). Partisipasi masyarakat pada program Jogo Tonggo di Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan pandemi COVID-19. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1). <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.65>